

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan selama rentang waktu bulan April sampai dengan Juni (Triwulan II) tahun 2026 di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. April 2026

- Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-1 April 2026 sebesar 0,11 persen. Komoditas yang memberi andil terbanyak dalam perubahan IPH di Kabupaten Tegal, yaitu daging sapi, daging ayam ras, dan jeruk.
- Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-2 April 2026 sebesar -1,99 persen. Komoditas yang memberi andil terbanyak dalam perubahan IPH di Kabupaten Tegal, yaitu cabai rawit, cabai merah, dan telur ayam ras.
- Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-3 April 2026 sebesar -2,73 persen. Komoditas yang memberi andil terbanyak dalam perubahan IPH di Kabupaten Tegal, yaitu cabai rawit, cabai merah, dan daging sapi.
- Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-4 April 2026 sebesar -3,16 persen. Komoditas yang memberi andil terbanyak dalam perubahan IPH di Kabupaten Tegal, yaitu cabai rawit, daging sapi, dan cabai merah.
- Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-5 April 2026 sebesar -3,39 persen. Komoditas yang memberi andil terbanyak dalam perubahan IPH di Kabupaten Tegal, yaitu cabai rawit, daging sapi, dan daging ayam ras.

2. Mei 2026

- Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-1 Mei 2026 sebesar 0.36 persen. Komoditas yang memberi andil terbanyak dalam perubahan IPH di Kabupaten Tegal, yaitu cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
- Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-2 Mei 2026 sebesar 0.59 persen. Komoditas yang memberi andil terbanyak dalam perubahan IPH di Kabupaten Tegal, yaitu cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
- Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-3 Mei 2026 sebesar 0.53 persen. Komoditas yang memberi andil terbanyak dalam perubahan IPH di Kabupaten Tegal, yaitu cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

3. Juni 2026

- Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-1 Juni 2026 sebesar 0.16 persen. Komoditas yang memberi andil terbanyak dalam perubahan IPH di Kabupaten Tegal, yaitu bawang merah, daging sapi, dan daging ayam ras.
- Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-2 Juni 2026 sebesar -0,14 persen. Komoditas yang memberi andil terbanyak dalam perubahan IPH di Kabupaten Tegal, yaitu cabai merah, cabai rawit, dan udang basah.
- Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-3 Juni 2026 sebesar -0.24 persen. Komoditas yang memberi andil terbanyak dalam perubahan IPH di Kabupaten Tegal, yaitu cabai merah, cabai rawit, dan udang basah.
- Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-4 Juni 2026 sebesar -0.63 persen. Komoditas yang memberi andil terbanyak dalam perubahan IPH di Kabupaten Tegal, yaitu cabai merah, cabai rawit, dan udang basah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Selama Triwulan II Tahun 2026 (April-Juni), perkembangan harga di Kabupaten Tegal menunjukkan kecenderungan meningkat pada beberapa komoditas strategis, khususnya bahan pangan pokok. Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan hasil pemantauan lapangan, komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi daerah meliputi cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng. Kenaikan harga komoditas tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun kondisi eksternal yang berdampak pada stabilitas pasokan dan harga.

Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta perangkat daerah terkait, permasalahan utama pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 meliputi:

1. **Cuaca dan iklim yang tidak menentu**, berupa perubahan suhu dan curah hujan yang berdampak pada menurunnya produksi komoditas hortikultura, terutama cabai dan bawang merah.
2. **Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat**, yang menyebabkan kenaikan harga bahan baku maupun komoditas yang bergantung pada pasokan impor.
3. **Kenaikan harga bahan kemasan**, khususnya plastik, yang meningkatkan biaya produksi dan berdampak pada kenaikan harga jual barang kemasan.
4. **Terbatasnya ketersediaan stok minyak goreng di tingkat distributor**, sehingga pasokan menjadi terbatas dan harga jual di pasar mengalami peningkatan.
5. **Fluktuasi harga material konstruksi**, seperti aspal, semen, dan bahan pendukung lainnya, yang dipengaruhi oleh dinamika pasar dan faktor eksternal sehingga berdampak pada pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pendukung distribusi.
6. **Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jaringan irigasi** yang masih menghadapi keterbatasan anggaran, penyesuaian prioritas kegiatan, dan kendala cuaca, sehingga memengaruhi kelancaran distribusi barang serta produktivitas sektor pertanian.
7. **Jebolnya Bendung Cipro (DI Rambut) pada Maret 2026 akibat banjir** yang hingga Juli 2026 belum memperoleh perbaikan permanen telah mengganggu pasokan air irigasi bagi sekitar 643 hektare lahan sawah di Kecamatan Warureja dan Suradadi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko puso pada musim tanam MT I/MT II serta menyebabkan penurunan produktivitas padi secara signifikan. Di lapangan, hasil panen petani dilaporkan turun drastis, sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan pasokan beras di Kabupaten Tegal dan menekan pendapatan petani.

Meskipun demikian, ketersediaan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi yang memadai tetap menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan keberlangsungan sektor pertanian. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan ketahanan produksi pangan, perbaikan infrastruktur, serta pengendalian rantai pasok menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Tegal.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi pada Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal melaksanakan berbagai upaya melalui implementasi **Strategi 4K**, yaitu **Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran**

Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Pelaksanaan strategi tersebut didukung oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang berperan dalam penyediaan infrastruktur pendukung distribusi barang dan jasa.

1. Keterjangkauan Harga

Upaya menjaga keterjangkauan harga dilakukan melalui pelaksanaan **Gerakan Pangan Murah (GPM)** dan **Operasi Pasar Murah (OPM)** sebagai langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Selama Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan:

- Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak **7 kali**;
- Kios Pangan Murah (KPM) sebanyak **1 kali**;
- Subsidi harga komoditas pangan dan minyak goreng sebanyak **2 kali**.

Program tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan gejolak harga komoditas pangan strategis.

2. Ketersediaan Pasokan

Untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan, Pemerintah Kabupaten Tegal melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

- Pemantauan harga dan stok komoditas pokok setiap hari di Pasar Trayeman melalui aplikasi **SP2KP**;
- Pemantauan stok pangan di distributor dan pasar sebagai langkah antisipasi kelangkaan pasokan;
- Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng;
- Penyaluran bantuan prasarana pertanian guna mendukung peningkatan produksi pangan.

Langkah tersebut bertujuan menjaga kontinuitas pasokan sehingga mampu meredam tekanan inflasi dari sisi penawaran.

3. Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi menjadi salah satu fokus utama pengendalian inflasi melalui dukungan terhadap transportasi dan infrastruktur. Upaya yang dilaksanakan meliputi:

- Fasilitasi transportasi, bongkar muat, dan pengemasan pada kegiatan Gerakan Pangan Murah;
- Pemeliharaan rutin jalan pada ruas-ruas strategis untuk menjaga mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Selain itu, **DPUPR Kabupaten Tegal** melaksanakan percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta perencanaan pengembangan jaringan irigasi sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung distribusi komoditas. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan efisiensi anggaran melalui penetapan prioritas pada ruas jalan dan jaringan irigasi yang memiliki tingkat urgensi tinggi serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pada Triwulan II Tahun 2026, DPUPR melaksanakan berbagai paket pekerjaan dalam **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi dengan luas di bawah 1.000 hektare**. Kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan rutin jalan pada berbagai ruas strategis, perbaikan jembatan, penyusunan dokumen perencanaan peningkatan jalan, pengadaan aspal coldmix untuk mendukung program pemeliharaan jalan, serta penyusunan **Detail Engineering Design (DED)** dan **Review DED** jaringan irigasi.

Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Di sektor pertanian, penyusunan DED dan Review DED jaringan irigasi dilakukan untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur sumber daya air, menjaga ketersediaan air irigasi, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi.

Secara umum, pelaksanaan fisik pekerjaan telah berjalan sesuai rencana, meskipun sebagian penyerapan anggaran masih berlangsung karena proses administrasi dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Keberlanjutan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur diharapkan mampu menjaga kondisi jalan tetap fungsional, mengurangi hambatan distribusi komoditas, meningkatkan efisiensi biaya logistik, serta mendukung stabilitas harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Tegal.

4. Komunikasi Efektif

Pemerintah Kabupaten Tegal terus memperkuat koordinasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui:

- Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap hari Senin yang terintegrasi dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi;
- Rapat koordinasi TPID Kabupaten Tegal yang dilaksanakan minimal satu kali setiap bulan;
- Publikasi informasi harga pangan melalui media sosial dan berbagai kanal informasi resmi pemerintah daerah.

Komunikasi yang efektif menjadi instrumen penting dalam memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan transparansi informasi harga, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya pengendalian inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pengendalian inflasi selama Triwulan II Tahun 2026, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui implementasi Strategi 4K secara umum telah berjalan dengan baik. Berbagai kegiatan stabilisasi harga, pemantauan pasokan, dukungan kelancaran distribusi, serta pembangunan infrastruktur pendukung telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung aktivitas perekonomian daerah.

Pelaksanaan kegiatan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

juga menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan terlaksananya berbagai paket pemeliharaan jalan serta kegiatan perencanaan jaringan irigasi sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Pemeliharaan jalan pada sejumlah ruas strategis telah meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan memperlancar distribusi barang dan jasa, sedangkan penyusunan DED dan Review DED jaringan irigasi menjadi langkah awal dalam meningkatkan layanan irigasi guna mendukung produktivitas sektor pertanian dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pengendalian inflasi, antara lain:

1. **Disparitas harga antar wilayah masih relatif tinggi**, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan intervensi agar harga komoditas strategis lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.
2. **Pengendalian pasokan perlu semakin diperkuat**, khususnya melalui penyesuaian antara ketersediaan pasokan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan waktu, sehingga potensi kelangkaan maupun kelebihan pasokan dapat diantisipasi secara lebih efektif.
3. **Kelancaran distribusi barang masih perlu ditingkatkan**, baik melalui optimalisasi jaringan distribusi maupun peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, agar biaya logistik dapat ditekan dan perbedaan harga antarwilayah semakin berkurang.
4. **Fluktuasi harga material konstruksi** serta tingginya kebutuhan penanganan infrastruktur masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan maupun jaringan irigasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 telah berjalan sesuai target dan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta prioritas pembangunan daerah. Kedepan, sinergi antarperangkat daerah, penguatan pengelolaan pasokan dan distribusi, serta percepatan penyediaan infrastruktur pendukung diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga di Kabupaten Tegal.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026, diperlukan penguatan kebijakan dan sinergi lintas sektor agar upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Tegal dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain menjaga stabilitas harga melalui penguatan pasokan dan distribusi, dukungan pembangunan infrastruktur juga perlu terus ditingkatkan untuk memperlancar arus barang, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Adapun rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pada periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. **Mempercepat pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** guna memperkuat ketersediaan pasokan komoditas strategis, sehingga distribusi antarwilayah menjadi lebih merata dan risiko kelangkaan pasokan dapat diminimalkan.
2. **Menjaga keseimbangan produksi dan kebutuhan pasar** melalui pengelolaan produksi yang terukur, sehingga harga komoditas tetap berada pada tingkat yang wajar dan memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun produsen.
3. **Mengoptimalkan distribusi komoditas pangan**, terutama dengan mempercepat

penyaluran hasil produksi dari wilayah surplus menuju wilayah defisit yang mengalami kenaikan harga, sehingga disparitas harga antarwilayah dapat ditekan.

4. **Melaksanakan intervensi stabilisasi harga secara cepat dan tepat sasaran** pada wilayah yang mengalami lonjakan harga tertinggi melalui operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), maupun bentuk intervensi lainnya sesuai kondisi lapangan.
5. **Memperkuat pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)** secara proporsional dan berimbang dari sisi hulu hingga hilir untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi gejolak harga.
6. **Melanjutkan percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur** yang mendukung konektivitas wilayah serta kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga biaya logistik dapat ditekan dan akses masyarakat terhadap komoditas kebutuhan pokok semakin baik.
7. **Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran infrastruktur** berdasarkan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lapangan agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal.
8. **Melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan harga material konstruksi** sebagai dasar penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur, sehingga potensi hambatan akibat fluktuasi harga dapat diantisipasi sejak dini.
9. **Meningkatkan sinergi antar perangkat daerah** dalam mendukung stabilitas pasokan pangan, kelancaran distribusi komoditas strategis, serta pelaksanaan program pengendalian inflasi melalui koordinasi yang lebih intensif.
10. **Memperkuat pengembangan infrastruktur irigasi** melalui percepatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketersediaan air, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan mendukung pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
11. **Percepatan Perbaikan Permanen Bendung Cipero**
Berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Pemali Juana agar perbaikan permanen Bendung Cipero menjadi prioritas, mengingat kerusakan bendung telah menyebabkan terganggunya pasokan air irigasi bagi lahan pertanian di Kecamatan Suradadi, Warureja, dan Kramat. Hal ini juga telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui surat permohonan kepada BBWS Pemali Juana tertanggal 26 Maret 2026 Nomor 600.1/217-1/1-06 yang telah ditandatangani Bupati Tegal.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Tegal dapat terus meningkat, didukung oleh ketersediaan pasokan yang memadai, distribusi yang lancar, infrastruktur yang andal, serta koordinasi yang kuat antar perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan.